

LAMPIRAN I TABEL KINERJA TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
 Tahun Anggaran : 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber	Indeks	1,6	I	1,6
					II	1,6
					III	1,6
					IV	1,6
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	3,05	I	3,05
					II	3,05
					III	3,05
					IV	3,05
1.1	Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	84,75	I	84,75
					II	84,75
					III	84,75
					IV	84,75
		Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	Indeks	1,6	I	1,6
					II	1,6
					III	1,6
					IV	1,6
1.2	Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	3,27	I	3,27
					II	3,27
					III	3,27
					IV	3,27

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	: Rp. 8.597.481.877,16
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	: Rp. 1.682.167.036,00
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	: Rp. 9.227.669.855,37
4.	Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	: Rp. 250.936.634,00
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	: Rp. 1.181.796.256,00
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	: Rp. 125.000.000,00
	Jumlah Anggaran	: Rp. 21,065,051,658.53

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANTUL



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T.,M.T.
NIP. 196906191996031003

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2026

Uraian Tujuan:

Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan

Yang dimaksud dalam Tujuan kinerja Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan merupakan upaya penguatan tata kelola pemerintahan digital melalui pengembangan layanan elektronik yang terintegrasi dan terlindungi, serta penyediaan data statistik berkualitas sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Dan Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi.
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2019 Pengelolaan Data Center
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi
- d. Peraturan Bupati Bantul No.11 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul

Untuk mencapai tujuan kinerja ini, perlu dilakukan penguatan transformasi layanan publik berbasis digital secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui peningkatan tata kelola SPBE, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik, penguatan keamanan siber, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya tersebut didukung dengan penguatan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi dan pemanfaatan data lintas perangkat daerah, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Indikator Kinerja

Tujuan kinerja ini memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber	Tingkat kematangan aspek keamanan siber dalam Indeks Pemerintahan Digital diukur untuk menilai kesiapan pemerintah daerah dalam melindungi sistem, data, dan layanan digital melalui tata kelola, manajemen risiko, kapasitas SDM, penanganan insiden, serta peningkatan keamanan siber secara berkelanjutan.	Hasil penilaian Kemenpan RB pada aspek keamanan siber dalam Indeks Pemerintah Digital	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik memiliki relevansi strategis sebagai alat ukur kualitas	Hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan	Badan Pusat Statistik

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	(IPS)	penyelenggaraan statistik sektoral yang mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data, transparansi pemerintahan, serta transformasi digital yang berkelanjutan.	statistik sektoral dari Badan Pusat Statistik	

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber	1,6	Tingkat Kematangan Aspek Keamanan Siber merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesiapan dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keamanan sistem pemerintahan digital secara menyeluruh, mencakup tata kelola dan kebijakan keamanan, pengelolaan risiko, perlindungan sistem dan data, kapasitas sumber daya manusia, mekanisme penanganan insiden, serta pemantauan dan peningkatan keamanan siber secara berkelanjutan guna menjamin keandalan layanan publik digital dan perlindungan informasi strategis daerah.
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,05	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah daerah, yang mencakup penerapan prinsip Satu Data Indonesia, penguatan kelembagaan dan tata kelola statistik, kualitas proses dan hasil statistik, serta ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan data statistik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data yang akurat, mutakhir, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Uraian Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika adalah penyelenggaraan layanan telekomunikasi, internet, penyiaran, dan pengelolaan teknologi informasi pemerintah semakin andal, cepat, mudah diakses, transparan, serta aman. Peningkatan ini mencakup perluasan cakupan jaringan hingga wilayah terpencil, penyediaan informasi publik yang akurat dan tepat waktu, penerapan inovasi digital untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan, penguatan keamanan siber dan perlindungan data, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Dengan kualitas layanan yang semakin baik, komunikasi publik menjadi lebih efektif, partisipasi masyarakat meningkat, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat mendorong efisiensi kerja serta pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29).
- f) Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Dan Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi.
- g) Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan.
- h) Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2019 Pengelolaan Data Center.
- i) Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi.
- j) Peraturan Bupati Bantul No.11 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- k) Surat Kementerian PANRB Nomor B/66/PD.02/2025 tertanggal 21 April 2025 perihal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE.

Untuk mencapai sasaran kinerja ini, pemerintah daerah maupun instansi terkait perlu menjalankan serangkaian langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan. Beberapa pendekatan yang dapat ditempuh antara lain:

1. Penguatan Infrastruktur dan Akses
 - Memperluas jaringan telekomunikasi dan internet hingga ke daerah terpencil.
 - Meningkatkan kapasitas bandwidth dan kualitas koneksi untuk mendukung layanan digital publik.
2. Peningkatan Kualitas Sistem Informasi dan Aplikasi
 - Mengembangkan layanan berbasis e-government dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang mudah digunakan dan responsif.

- Mengintegrasikan berbagai platform informasi agar masyarakat tidak kebingungan dalam mengakses layanan.
3. **Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik**
 - Mengoptimalkan portal informasi publik dan mekanisme pengaduan online.
 - Menyediakan informasi yang akurat, terkini, dan mudah dipahami sesuai amanat UU KIP.
 4. **Peningkatan Keamanan Siber dan Perlindungan Data**
 - Menerapkan manajemen risiko siber, enkripsi, dan SOP penanganan insiden.
 - Memastikan sistem komunikasi dan informatika mematuhi PP 71/2019 dan pedoman BSSN.
 5. **Penguatan SDM dan Budaya Digital**
 - Melatih aparatur sipil negara (ASN) dalam pengelolaan teknologi informasi, komunikasi publik, dan keamanan siber.
 - Mendorong budaya kerja berbasis data dan inovasi teknologi.
 6. **Pemantauan, Evaluasi, dan Kepuasan Publik**
 - Melakukan survei kepuasan pengguna layanan komunikasi dan informatika secara berkala.
 - monitoring dan evaluasi ketercapaian Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik dan tingkat kematangan keamanan siber.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2(dua) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika memiliki relevansi langsung dengan Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik (IKLIP) karena keduanya saling memperkuat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan responsif. Layanan komunikasi dan informatika yang andal, cepat, dan mudah diakses memungkinkan masyarakat memperoleh informasi publik secara tepat waktu dan akurat, sehingga berdampak positif terhadap penilaian IKLIP. Infrastruktur TIK yang baik juga mempermudah partisipasi dan pengawasan publik melalui mekanisme pengaduan, masukan, atau konsultasi daring, yang merupakan aspek penting dalam penilaian kualitas layanan informasi. Selain itu, pengelolaan keamanan siber dan perlindungan data yang	Hasil survei mencakup empat kategori yaitu kualitas sistem informasi, kualitas informasi, kualitas layanan informasi dan kepuasan pengguna informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		<p>kuat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keaslian dan kerahasiaan informasi yang disampaikan pemerintah. Inovasi pelayanan berbasis teknologi, seperti portal e-government dan aplikasi layanan publik, turut membuat proses penyampaian dan permintaan informasi lebih efisien. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informatika menjadi fondasi penting untuk mencapai nilai IKLIP yang tinggi.</p>		
2	Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	<p>Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika sangat relevan dengan tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital karena keduanya saling menunjang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang andal dan aman. Layanan komunikasi dan informatika yang berkualitas memastikan infrastruktur jaringan, sistem informasi, dan aplikasi pemerintahan berjalan lancar, cepat, dan responsif, sehingga mendukung penerapan kebijakan keamanan siber secara efektif. Kualitas layanan yang baik juga mencakup penerapan standar perlindungan data, enkripsi, manajemen risiko, dan mekanisme penanganan insiden siber, yang merupakan indikator penting dalam penilaian kematangan keamanan siber. Selain itu, komunikasi publik yang transparan dan sistem informasi yang terintegrasi memperkuat koordinasi antarinstansi serta meningkatkan kesadaran keamanan siber di lingkungan pemerintah. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informatika</p>	Hasil penilaian Kemenpan RB pada indikator keamanan siber pemerintah digital	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		bukan hanya meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga menjadi landasan strategis untuk mencapai tingkat kematangan keamanan siber yang lebih tinggi dalam ekosistem pemerintah digital.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	84,75	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik (IKLIP) merupakan ukuran atau instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas layanan informasi publik yang diberikan oleh badan publik telah memenuhi prinsip keterbukaan, akurasi, kecepatan, kemudahan akses, dan kepuasan masyarakat. IKLIP biasanya digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kinerja dalam menjalankan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	1,6	Tingkat Kematangan Keamanan Siber Pemerintah Digita merupakan komponen penilaian yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan kebijakan, prosedur, dan praktik keamanan siber secara efektif dalam ekosistem pemerintahan berbasis elektronik. Indikator ini menggambarkan tingkat kesiapan pemerintah dalam melindungi infrastruktur digital, data, dan layanan publik dari ancaman siber, serta memastikan keberlangsungan operasional dan kepercayaan masyarakat. Dalam Indeks PEMDI, aspek ini memiliki bobot sekitar 11% dan menilai dimensi seperti kebijakan dan tata kelola keamanan informasi, perlindungan infrastruktur kritis, manajemen risiko dan penanganan insiden, kesadaran serta kompetensi SDM, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala. Penilaian tingkat kematangan ini membantu pemerintah mengetahui posisi kesiapan sibernya, menyusun prioritas perbaikan, dan memperkuat kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Uraian Sasaran 2 :

Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data statistik dilakukan dengan standar mutu yang lebih baik, akurat, relevan, mudah diakses, dan tepat waktu, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks pemerintahan, khususnya mengacu pada kebijakan Satu Data Indonesia dan tata kelola statistik sektoral, peningkatan ini mencakup:

- Akurasi dan Keandalan Data – Data yang dihasilkan memiliki validitas tinggi, metode pengumpulan sesuai kaidah ilmiah, dan bebas dari bias.
- Relevansi dan Keterkinian – Statistik yang disajikan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan dan diperbarui secara berkala.
- Keterpaduan dan Standarisasi – Data antarinstansi selaras melalui metadata, kode referensi, dan format yang seragam.
- Aksesibilitas dan Kemudahan Layanan – Informasi statistik mudah diakses publik melalui portal resmi, publikasi, atau layanan konsultasi.
- Pemanfaatan Teknologi – Penggunaan sistem informasi statistik modern dan platform digital untuk mempercepat proses pengolahan dan distribusi data.
- Kepuasan Pengguna – Peningkatan kualitas layanan berdampak pada meningkatnya kepercayaan dan kepuasan pengguna data.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain

- f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Dan Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi.
- g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2019 Pengelolaan Data Center
- h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi
- i. Peraturan Bupati Bantul No.11 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul

Untuk mencapai sasaran kinerja ini, pemerintah perlu memperkuat tata kelola data dengan mengacu pada UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, PP Nomor 51 Tahun 1999, serta Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Upaya ini mencakup penerapan standar dan metadata statistik, peningkatan akurasi serta keterkinian data melalui validasi dan integrasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pengolahan dan penyebaran data yang lebih cepat dan transparan. Selain itu, perlu diperluas aksesibilitas layanan statistik melalui portal daring, publikasi berkala, dan pusat layanan pengguna, disertai edukasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan agar data dimanfaatkan secara tepat. Penguatan kapasitas SDM statistik melalui pelatihan metodologi, analisis data, dan pengelolaan teknologi juga menjadi faktor penting. Langkah-langkah ini harus didukung mekanisme monitoring, evaluasi, dan survei kepuasan pengguna agar hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, layanan statistik pemerintah akan semakin akurat, andal, mudah diakses, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik sangat erat karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Prinsip-prinsip dalam Satu Data Indonesia—meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi—menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan statistik. Penerapan standar data dan metadata yang seragam memastikan proses pengumpulan dan penyajian statistik lebih akurat, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan. Interoperabilitas data memperkuat keterpaduan antarinstansi dan mencegah duplikasi, sehingga layanan statistik menjadi lebih efisien dan cepat. Penggunaan kode referensi yang baku memudahkan integrasi data lintas sektor dan mempermudah akses publik terhadap informasi statistik. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai domain Satu Data Indonesia secara langsung meningkatkan kualitas layanan statistik, memperkuat transparansi, dan mendukung perencanaan pembangunan yang efektif.	Hasil penilaian Domain Prinsip Satu Data Indonesia dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	3,27	<p>Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia merupakan seperangkat nilai utama yang menjadi landasan penerapan kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Nilai-nilai domain ini dirancang untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dan dikelola oleh pemerintah memiliki kualitas tinggi, seragam, dan dapat dimanfaatkan secara luas. Empat nilai domain pokok tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar Data – Penetapan format, definisi, satuan ukur, dan metode pengumpulan yang seragam agar data yang dihasilkan dapat dibandingkan dan diintegrasikan lintas instansi.2. Metadata – Penyediaan informasi pendukung tentang data (misalnya sumber, metodologi, cakupan, dan waktu pengumpulan) untuk menjamin transparansi dan memudahkan pemahaman pengguna.3. Interoperabilitas Data – Kemampuan sistem dan format data untuk saling bertukar dan menggunakan informasi, sehingga data dari berbagai sumber dapat dipadukan tanpa kehilangan makna.4. Kode Referensi dan/atau Data Induk – Penggunaan kode dan referensi yang baku (misalnya kode wilayah atau sektor) untuk menghindari perbedaan penafsiran dan duplikasi data. <p>Keempat nilai domain ini menjadi kerangka kerja penting untuk memastikan kualitas layanan statistik, memperkuat integrasi data lintas sektor, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam pembangunan nasional maupun daerah.</p>

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
 Jabatan : Sekretaris
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Angka	94.25	I	94.25
						II	94.25
						III	94.25
						IV	94.25
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	81,58	I	81,58
						II	81,58
						III	81,58
						IV	81,58

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Rp 8.597.481.877,16
 Jumlah Anggaran : Rp 8.597.481.877,16

2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



BOBOT ARIFFI AIDIN, S.T., M.T.
NIP. 196906191996031003

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS



PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng
NIP. 197310141995031002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/ Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	I	2
					II	0
					III	2
					IV	0
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16	I	4
					II	4
					III	4
					IV	4
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	54	I	54
					II	54
					III	54
					IV	54
4	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
5	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	18	I	4
					II	5
					III	4
					IV	5

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	: Rp	2.450.000,00
1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	: Rp	2.450.000,00
2) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	: Rp	0,00
B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	: Rp	7.752.373.796,13
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	: Rp	7.600.153.796,13
2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	: Rp	152.220.000,00
3) Subkegiatan Koordinasi dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	: Rp	0,00
Jumlah Anggaran	: Rp	7.754.823.796,13

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS



PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng
NIP. 197310141995031002

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN



AGUNG NUGROHO, S.Sos
NIP. 198407302010011014

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/ Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	13	I	13
					II	13
					III	13
					IV	13
4	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	I	8
					II	0
					III	0
					IV	0
5	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	I	7
					II	7
					III	7
					IV	7
6	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	I	2
					II	2
					III	2
					IV	2

No	Sasaran Kinerja/ Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
7	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	3	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
8	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
10	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
11	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
13	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
14	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
15	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Dokumen	12	I	3
					II	3



No	Sasaran Kinerja/ Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
		Umum Kantor yang Disediakan			III	3
					IV	3
16	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	17	I	17
					II	17
					III	17
					IV	17
17	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	186	I	186
					II	186
					III	186
					IV	186
18	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	I	1
					II	1
					III	1
					IV	1

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	:	Rp	0,00
1) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	:	Rp	0,00
B. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	:	Rp	0,00
1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	:	Rp	0,00
C. Administrasi Umum Perangkat Daerah	:	Rp	244.554.434,00
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	:	Rp	11.984.690,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	Rp	93.850.000,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	:	Rp	11.691.244,00
4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	:	Rp	2.743.000,00
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	:	Rp	3.000.000,00
6) Fasilitasi Kunjungan Tamu	:	Rp	2.370.000,00
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	:	Rp	118.915.500,00
8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	:	Rp	0,00

9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	:	Rp	0,00
D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	:	Rp	325.787.947,03
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	:	Rp	6.000.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	:	Rp	30.000.000
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	Rp	13.300.519,03
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	:	Rp	276.487.428,00
E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	:	Rp	272.315.700,00
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	:	Rp	186.145.700,00
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	:	Rp	86.170.000,00
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	:	Rp	0,00
Jumlah Anggaran	:	Rp	842.658.081.03

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS



PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng
NIP. 197310141995031002

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



MUDJIJANA, S.S.T
NIP. 197105231997031004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	98,50	I	98,50
						II	98,50
						III	98,50
						IV	98,50*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Program Informasi dan Komunikasi Publik	:	Rp	1.682.167.036,00
Jumlah Anggaran	:	Rp	1.682.167.036,00

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.
NIP. 196906191996031003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998101001

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telepon: 0274 367 509
Laman: www.diskominfo.bantulkab.go.id; Pos-el: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RACHMANTO, S.S.T.
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ARIF DARMAWAN, S.STP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998101001

PIHAK PERTAMA
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
AHLI MUDA



RACHMANTO, S.S.T.
NIP. 197111041993031006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/ Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	1.231.316.000,00
1) Sub Kegiatan Pengelolaan media komunikasi publik	:	Rp	1.231.316.000,00
Jumlah Anggaran	:	Rp	1.231.316.000,00

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998101001

PIHAK PERTAMA
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
AHLI MUDA



RACHMANTO, S.S.T.
NIP. 197111041993031006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/ Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	20	I	5
					II	5
					III	5
					IV	5

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	14.700.000
1) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	:	Rp	14.700.000
Jumlah Anggaran	:	Rp	14.700.000

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998101001

PIHAK PERTAMA

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



IRFAN BUDI SANTOSO, S.S.T., M.Eng
NIP. 198306242006041007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/ Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	54	I II III IV	54 54 54 54*

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	226.216.000
1) Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	:	Rp	226.216.000
Jumlah Anggaran	:	Rp	226.216.000

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998101001

PIHAK PERTAMA
PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN



ELSHA DESIANA PUTRI, S.Tr.I.Kom
NIP. 199312142022032009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
Tahun Anggaran : 2026

N o	Sasaran Kinerja/ Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	250.855.160
1) Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	:	Rp	250.855.160
Jumlah Anggaran	:	Rp	250.855.160

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998101001

PIHAK PERTAMA
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
AHLI PERTAMA



SYIFAA SHAABIRINA LISSALMI, S.I.Kom
NIP. 199207132020122010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Program Aplikasi Informatika	Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah	Angka	1.6	I	1.6
						II	1.6
						III	1.6
						IV	1.6
2.	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	96.45	I	96.45
						II	96.45
						III	96.45
						IV	96.45*
3.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	2.53	I	2.53
						II	2.53
						III	2.53
						IV	2.53*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:
 - A. Program Aplikasi Informatika : Rp 8.379.669.855,37
 - B. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi : Rp 1.155.796.256,00
 - C. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan : Rp 125.000.000,00
- Jumlah Anggaran : Rp 9.660.466.111,37

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T.,M.T.
NIP. 196906191996031003

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI, KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN



KAWUNINGRUM, S.T.M.Cs
NIP. 197106261998032003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ꦩꦶꦏꦸꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦏꦏꦶꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦏꦶꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦏꦶꦩꦸꦤꦶꦏꦏ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MACHMUD MURDIYANTO, S.S.T
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : KAWUNININGRUM, S.T.,M.Cs
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI, KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN



KAWUNININGRUM, S.T., M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA

PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA



MACHMUD MURDIYANTO, S.S.T
NIP. 197501261995031001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	45	I	45
					II	45
					III	45
					IV	45
		Jumlah paket pada Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Paket	17	I	9
					II	5
					III	3
					IV	0

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota

1) Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	:	Rp	2.019.983.104
---	---	----	---------------

Jumlah Anggaran	:	Rp	2.019.983.104
-----------------	---	----	---------------

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI
INFORMASI, KEAMANAN INFORMASI DAN
PERSANDIAN



KAWUNININGRUM, S.T. M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA

PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA



MACHMUD MURDIYANTO, S.ST
NIP. 197501261995031001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	17	I	17
					II	0
					III	0
					IV	0

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	595.546.500
1) Penyediaan Akses Internet	:	Rp	595.546.500
Jumlah Anggaran	:	Rp	595.546.500

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI, KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN



KAWUNININGRUM, S.T., M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA

PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA



MURTINI, S.AP
NIP. 197105081992032005



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ꦩꦶꦏꦸꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦩꦶꦤꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦨꦠꦸꦭ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telepon: 0274 367 509
Laman: www.diskominfo.bantulkab.go.id; Pos-el: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINARTONO, S.Sos
Jabatan : Sandiman Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : KAWUNININGRUM, S.T.,M.Cs
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI, KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN



KAWUNININGRUM, S.T.,M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA
SANDIMAN AHLI MUDA



WINARTONO, S.Sos
NIP. 197705121997121002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Sandiman Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	45	I	45
					II	45
					III	45
					IV	45
2	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi.	Perangkat Daerah	45	I	45
					II	45
					III	45
					IV	45

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	875.790.000
1) Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	:	Rp	875.790.000
B. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	306.006.256
2) Subkegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	:	Rp	306.006.256
Jumlah anggaran	:	Rp	1.181.796.256

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI, KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN



KAWUNININGRUM, S.T., M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA

SANDIMAN AHLI MUDA



WINARTONO, S.Sos
NIP. 197705121997121002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Dokumen	2	I	0
					II	0
					III	1
					IV	1

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	5.427.335.000,
1) Subkegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	:	Rp	5.427.335.000
Jumlah Anggaran	:	Rp	5.427.335.000,

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI, KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN



KAWUNININGRUM.S.T.M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA



ZAIN ARRIFA'I ST
NIP. 197708192010011010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Jabatan : Kepala Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Program Aplikasi Informatika	Tingkat kematangan pembangunan/ pengembangan aplikasi	Angka	1,6	I	n/a
						II	n/a
						III	n/a
						IV	1,6*
2.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	I	100
						II	100
						III	100
						IV	100*
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	I	100
						II	100
						III	100
						IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Program Aplikasi Informatika	:	Rp1.419.015.251,00
B. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	:	Rp 250.936.634,00
Jumlah Anggaran	:	Rp1.669.951.885,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T.,M.T.
NIP. 196906191996031003

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG TATA KELOLA
E-GOVERNMENT, APLIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK



SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.
NIP. 198012031999122001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten/kota cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	dokumen	1	I	0
					II	0
					III	0
					IV	1*
2.	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE, meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	dokumen	1	I	0
					II	0
					III	0
					IV	1*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:
 - A. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah : Rp258.985.251,37
 - 1) Subkegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah : Rp175.235.251,37
 - 2) Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas : Rp83.750.000,00
 - Jumlah Anggaran : Rp258.985.251,37
2. *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA KELOLA E-
GOVERNMENT, APLIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK



SRI MULYANI, S.STP., M.Eng
NIP. 198012031999122001

PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA



IDA SEKARSARI, ST., M.Eng.
NIP. 198304082010012023

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Statistisi Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya statistik sektoral yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	90	I	0
					II	0
					III	0
					IV	90*
2.	Terlaksananya proses bisnis statistik sektoral sesuai standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	%	100	I	0
					II	0
					III	0
					IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:
 - A. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota : Rp146.100.000,00
 - 1) Subkegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia : Rp128.950.000,00
 - 2) Subkegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar : Rp17.150.000,00
 - Jumlah Anggaran : Rp146.100.000,00
2. *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
 KEPALA BIDANG TATA KELOLA
 E-GOVERNMENT, APLIKASI
 INFORMATIKA DAN STATISTIK



SRI MULYANI, S.STP., M.Eng
 NIP. 198012031999122001

PIHAK PERTAMA

STATISTISI AHLI MUDA



HETTIK, S.T., M.Eng
 NIP. 198302152010012007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	16	I	4
					II	6
					III	3
					IV	3

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Sub Kegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Kegiatan Pengelolaan <i>E-Government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp 528.770.000,00
1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	:	Rp 528.770.000,00
Jumlah Anggaran	:	Rp 528.770.000,00
2. *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV

PIHAK KEDUA
 KEPALA BIDANG TATA KELOLA
E-GOVERNMENT, APLIKASI
 INFORMATIKA DAN STATISTIK



SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.
 NIP. 198012031999122001

Bantul, 7 Januari 2026
 PIHAK PERTAMA

PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA



NABILA SHOLIHAH, S.Kom.
 NIP. 199308172019022001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	23	I	0
					II	0
					III	0
					IV	23*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp631.260.000,00
1) Subkegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	:	Rp631.260.000,00
Jumlah Anggaran	:	Rp631.260.000,00
2. *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV

PIHAK KEDUA
 KEPALA BIDANG TATA KELOLA
E-GOVERNMENT, APLIKASI
 INFORMATIKA DAN STATISTIK



SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.
 NIP. 198012031999122001

Bantul, 30 Januari 2026
 PIHAK PERTAMA

PENATA KELOLA SISTEM DAN
 TEKNOLOGI INFORMASI



JAROT ACHID ALVIAN, S.Kom.
 NIP. 199010102019021001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terlaksananya proses bisnis statistik sektoral sesuai standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	%	100	I	0
					II	0
					III	0
					IV	100*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:
 - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota : Rp104.836.634,00
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar : Rp104.836.634,00
 - Jumlah Anggaran : Rp104.836.634,00
- *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA KELOLA
E-GOVERNMENT, APLIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK



SRI MULYANI, S.STP., M.Eng
NIP. 198012031999122001

Bantul, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA

PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN



ORCHIDANIA AZIZAH, S.Si
NIP. 199804102022032009